



SUMBER BERITA

JUM'AT, 07 SEPTEMBER 2018

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
X	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Kasus TPP Seluma terus Digeber Jaksa

RBI, BENGKULU - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bengkulu, Baginda Polin Lumban Gaol SH, MH melalui Aspidus Hendri Nainggolan SH, MH kembali menengaskan, bahwa kasus anggaran Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) pada Pemerintah Daerah (Pemda) kabupaten Seluma, hingga saat ini masih dalam proses penyelidikan. Namun ia memastikan pengusutan kasus tersebut terus berlanjut.

Sesuai dengan laporan yang diterima, bahwa pengucuran dana TPP di Kabupaten Seluma dalam satu tahun mencapai Rp 50 Miliar. Dari dana yang dikucurkan tersebut diduga ada menimbulkan kerugian negara. Namun diakuinya, hingga saat ini perkara tersebut statusnya belum ada peningkatan, dan masih dalam proses pengumpulan keterangan dan data (Pulbaket). Selain dari itu, di Kejati Bengkulu ini, juga masih kekur-

gan personil. Jadi untuk menyelesaikan perkara korupsi harus diselesaikan satu-persatu.

"Kita pastikan lanjut kasus TPP yang di kabupaten Seluma ini. Tetapi kita masti harus menyelesaikan satu-satu. Hari ini (kemarin red) kita sudah menetapkan 2 orang tersangka kasus penyusunan Raperda di Bengkulu Utara. Sekarang perkara yang menunggu yaitu kasus temuan BPK di Bengkulu Tengah, memang sudah naik ke Penyidikan untuk kasus Benteng ini. Tetapi kita masih membutuhkan beberapa hal lagi untuk menetapkan tersangkanya. Setelah itu nanti, barulah kita fokus ke TPP Seluma, semuanya akan kita lanjutan, tapi satu-satu,"kata Hendri Kamis,(6/9).

Untuk diketahui, selama proses Penyelidikan tim penyidik Kejati Bengkulu, sudah memanggil beberapa orang pejabat di Lingkup Pemda

Kabupaten Seluma yang dianggap mengetahui masalah pembayaran besaran TPP tersebut. Di antaranya yang sudah dimintai keterangan yaitu, Asisten I Pemda Kabupaten Seluma, Kabid DPP-KAD dan pejabat-pejabat lainnya yang dianggap mengetahui masalah TPP tersebut.

Diketahui juga, Perkara yang diduga merugikan negara ini dibidik Kejati setelah menerima laporan dari masyarakat, bahwa anggaran untuk TPPP di Kabupaten Seluma untuk satu tahun sebesar Rp 50 Miliar. Besaran TPP tersebut diduga tidak sesuai dengan beban kerja ASN pada Pemda Kabupaten Seluma. Hasil Penyelidikan sementara ini rincian besaran pembayaran TPP itu, untuk pejabat sekelas Kabid dan Kabag menerima Rp 16 Juta hingga Rp 12 Juta per bulan, dengan besaran pembayaran itu, kuat dugaan tidak ada dasar dan menyalahi aturan.(ide)